

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Minggu ke-2 Bulan Februari 2021 (tanggal 5 s.d. 11 Februari)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KINERJA BUMN DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN) TAHUN 2021

Achmad Sani Alhusain
Peneliti Madya/Kebijakan Ekonomi
achmad.alhusain@dpr.go.id



ISU ATAU PERMASALAHAN

- Tahun 2010-2020, PMN yang diberikan negara ke BUMN mencapai Rp187,47 triliun. Sebagai *impact*-nya, tahun 2010-2020 BUMN telah menyetorkan pendapatan kepada negara dalam bentuk deviden sebesar Rp377,8 triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp1.518,7 triliun. Dalam 5 tahun terakhir suntikan anggaran negara (investasi pemerintah) ke BUMN naik secara signifikan karena pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur.
- Pada tahun anggaran 2021, pemerintah mengalokasikan PMN untuk BUMN sebesar Rp42,38 triliun. Suntikan dana ini dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja perseroan BUMN tersebut dan diarahkan untuk memberikan dampak signifikan bagi kondisi sosial-ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Pada tahun 2021, PMN akan diberikan kepada 9 BUMN, yaitu: PT PLN (Rp5 triliun), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Rp20 triliun), PT Hutama Karya (Rp6,2 triliun), PT Sarana Multigriya Finansial (Rp2,25 triliun), PT Pelabuhan Indonesia III (Rp1,2 triliun), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Rp470 miliar), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Rp977 miliar), PT PAL Indonesia (Rp1,28 triliun), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Rp5 triliun).
- Investasi pemerintah di BUMN dibutuhkan sebagai katalis pemacu pembangunan dan kegiatan ekonomi nasional. BUMN juga diyakini dapat menjadi agen pembangunan karena aktivitasnya dapat mendorong perekonomian yang memiliki keluaran (*outcome*) yang tinggi secara sosial dan ekonomi. Tentu saja, peran investasi pemerintah ini perlu upaya efektivitas dan efisiensinya sehingga dapat merespons penilaian pihak swasta yang menilai investasi tersebut kurang menguntungkan.



FUNGSI DPR

Anggaran:

Sehubungan PMN ini sudah dialokasikan pada APBN Tahun 2021, maka dalam melaksanakan fungsi anggaran DPR dapat meninjau kembali alokasi anggaran ini dengan:

1. Melakukan perhitungan (*exercise*) dengan seksama terkait pengalokasian anggaran negara untuk PMN karena kebutuhan anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19 masih sangat besar, sementara pendapatan negara sangat terbatas.
2. Memastikan BUMN yang mendapatkan PMN merupakan BUMN yang sektor usahanya memiliki dampak langsung untuk mendukung pemulihan sosial dan ekonomi rakyat.
3. Memastikan pengalokasian dana PMN untuk BUMN harus berdasarkan Rencana Usaha Strategis (*strategic business plan*) yang matang agar PMN yang diberikan dapat dikelola secara optimal dan tepat sasaran.

Pengawasan:

1. Melakukan review atas kinerja BUMN penerima PMN Tahun 2020.
2. Meminta penjelasan kepada Menteri BUMN atas efektivitas pengelolaan PMN tahun 2020 sebagai salah satu bahan evaluasi kinerja BUMN.
3. Hasil evaluasi dapat dijadikan rujukan untuk meminta pertanggungjawaban BUMN atas investasi negara yang ditempatkan sebagai penambah modal.

ATENSI DPR RI

Menurut penilaian salah satu akademisi, dari 117 BUMN yang dimiliki negara, hanya beberapa BUMN saja yang berkinerja baik dan berkontribusi pada total pendapatan BUMN. Secara umum, BUMN belum dapat mengoptimalkan suntikan dana dari pemerintah. Dicontohkannya sampai akhir 2020, aset seluruh BUMN hampir mencapai Rp8.000 triliun, tetapi labanya hanya sekitar Rp150 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian aset perusahaan relatif kecil, yaitu dibawah 2%. Hanya saja, juga ditegaskan bahwa tolok ukur kinerja BUMN bukan semata-mata profit, tetapi juga dampak (keluaran) sosial-ekonominya. Sebab, BUMN menanggung beban penugasan melayani publik (*public service obligation*).

Untuk itu, DPR sebagai mitra pemerintah harus juga mampu mengawal peningkatan kinerja BUMN secara finansial dan sebagai agen pembangunan nasional sehingga dampaknya diharapkan dapat dirasakan masyarakat secara ril dan adil.

SUMBER

Kompas, 9 Februari 2021; Media Indonesia, 9 Februari 2021; Republika, 9 Februari 2021

